



## **Simbol Bunga Melati: Revolusi dan Perubahan di Tunisia**

**Hasbiyallah**

Fakultas Ushuluddin dan Adab  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

*hasbiyallah@syekh Nurjati.ac.id*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Revolusi Melati, Tunisia mengalami transformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi politik, terjadi perubahan menuju sistem yang lebih demokratis, dengan pembentukan konstitusi baru pada tahun 2014 dan pemilihan umum yang membentuk pemerintahan inklusif. Masalah ekonomi, seperti tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan ekonomi, tetap menjadi isu penting yang perlu diatasi. Sementara itu, masyarakat Tunisia juga menuntut keadilan sosial dan upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulannya, Revolusi Melati di Tunisia tidak hanya berdampak pada Tunisia itu sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gelombang revolusi Arab di seluruh wilayah. Peristiwa ini memberikan momentum bagi perjuangan hak-hak sipil, politik, dan sosial di negara-negara Arab lainnya, dengan harapan akan terjadi perubahan positif yang lebih luas dalam masyarakat Arab.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Perubahan, Revolusi Jasmin, Tunisia

**Abstract:** This research aims to explore the democracy transition in Tunisia after the Arab Spring. The research method used is qualitative descriptive, with data collected through a literature review approach. The research findings indicate that after the Jasmine Revolution, Tunisia underwent significant transformations in various sectors, including politics, economics, and social aspects. Politically, there was a shift towards a more democratic system, with the formation of a new constitution in 2014 and elections that

*established an inclusive government. Economic issues, such as high unemployment rates and economic inequality, remained significant and needed to be addressed. Additionally, Tunisian society demanded social justice and efforts to combat corruption. In conclusion, the Jasmine Revolution in Tunisia not only had an impact on Tunisia itself but also served as an inspiration for the broader wave of Arab revolutions across the region. This event provided momentum for the advocacy of civil, political, and social rights in other Arab countries, with hopes for a more extensive positive change in Arab societies.*

**Keywords:** *Democracy, Change, Jasmine Revolution, Tunisia*

## 1. Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah menjadi perhatian utama karena posisinya yang strategis, yakni berada di persimpangan tiga benua: Eropa, Asia, dan Afrika. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada Negara-negara di kawasan ini, dengan kondisi sosial politik mereka saling terkait. Tunisia, sebagai salah satu Negara Timur Tengah yang terletak di bagian utara Afrika, berbatasan langsung dengan Libya dan menghadap langsung ke Laut Mediterania. Keterdekatannya secara geografis juga memengaruhi kondisi sosial politik, seperti yang terlihat dalam munculnya revolusi yang dimulai di Tunisia dan dikenal sebagai *Arab Spring*.

Peristiwa Arab Spring, atau yang biasa dikenal sebagai Kebangkitan Arab, merupakan gejolak yang terjadi di kalangan masyarakat Arab sebagai respons terhadap pemerintahan otoriter. Masyarakat Arab sendiri menggambarkannya sebagai *Al-Tsaurat al-Arabiyyah*, sebuah revolusi yang diharapkan akan mengubah pola kehidupan dan nasib bangsa mereka setelah bertahun-tahun diperintah oleh rezim otoriter.<sup>1</sup>

Arab Spring, atau Musim Semi Arab, dapat dikategorikan sebagai sebuah revolusi karena melibatkan perubahan yang cepat dan mendadak. Musim Semi Arab dimulai di Tunisia, sebuah negara yang tidak pernah dianggap sebagai calon awal dari sebuah revolusi. Kejutan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Tunisia sebelumnya dikenal sebagai negara yang relatif stabil dibandingkan dengan

---

<sup>1</sup> Sahide, A. *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas. 2019. hlm 1

tetangganya. Revolusi ini pertama kali menyebar dari Tunisia ke Aljazair dan Mesir, negara-negara tetangga, sebelum akhirnya menyebar ke kawasan MENA lainnya. Selama prosesnya, diketahui bahwa Arab Spring ini berbeda dari revolusi-revolusi sebelumnya. Revolusi sebelumnya sering dilihat sebagai langkah yang diperlukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang sudah ada. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada saat Arab Spring muncul, pandangan tentang revolusi telah mengalami perubahan. Revolusi tidak lagi hanya dipandang sebagai cara untuk menciptakan perbaikan dan masa depan yang ideal. Sebaliknya, saat Arab Spring muncul, konsep revolusi diartikan sebagai gerakan revolusioner yang bertujuan memaksa pemerintahan otoriter dalam suatu negara untuk melakukan reformasi, atas nama para revolusioner yang mendambakan perubahan.<sup>2</sup>

Pada masa sebelum Revolusi Melati, Tunisia diperintah oleh rezim otoriter yang dipimpin oleh Presiden Zine El Abidine Ben Ali selama hampir 23 tahun. Pemerintahannya ditandai oleh represi politik, korupsi yang meluas, ketidaksetaraan sosial, dan pembatasan hak-hak sipil dan politik. Kondisi sosial dan ekonomi yang semakin memburuk di bawah pemerintahannya memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat Tunisia.

Pemicu revolusi ini terjadi pada Desember 2010, ketika seorang pedagang buah sayur bernama Mohamed Bouazizi melakukan tindakan putus asa dengan membakar dirinya sendiri sebagai protes atas pelecehan dan penindasan oleh aparat pemerintah. Tindakan heroiknya ini memicu protes dan demonstrasi massa yang meluas di seluruh Tunisia. Demonstrasi tersebut, yang dipimpin oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum muda, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok oposisi, segera berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut pengunduran diri Ben Ali dan perubahan demokratisasi.

Revolusi Melati mencapai puncaknya pada Januari 2011 ketika Presiden Ben Ali mengumumkan pengunduran dirinya dan melarikan diri dari Tunisia ke Arab Saudi. Kepergiannya membuka jalan bagi perubahan besar dalam politik Tunisia. Pemerintah sementara yang dibentuk setelah pengunduran dirinya segera memulai proses reformasi dan memulai persiapan untuk pemilihan umum yang demokratis.

---

<sup>2</sup> Bayat, A. *The Arab Spring and its Surprises. Development and Change*, 2013 hlm 597

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mendalami peristiwa Revolusi melati di Tunisia serta perubahan demokrasi yang terjadi di Negara tersebut pasca revolusi. Selain menarik bagi para peneliti, penelitian ini juga memiliki relevansi dalam pembelajaran sejarah, yaitu bahwa sejarah adalah serangkaian peristiwa yang unik, dan peristiwa tersebut tidak akan pernah berulang dengan persis sama. Yang dapat berulang hanya fenomena yang mungkin memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Sebagai contoh, fenomena sejarah seperti revolusi Tunisa pada tahun 2011 memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1998, yang memicu demonstrasi untuk menuntut pengunduran diri Soeharto. Meskipun revolusi di Tunisia tidak terinspirasi langsung oleh reformasi di Indonesia, keduanya memiliki kesamaan, terutama dalam penggunaan media sosial sebagai alat penyatuan dan mobilisasi rakyat.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Cresswell J penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang tidak bisa diperoleh melalui penggunaan prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif pada dasarnya dapat diterapkan pada studi mengenai sejarah, kehidupan masyarakat, perilaku individu, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan bidang lainnya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah kemampuannya dalam membantu mengungkap dan memahami aspek-aspek yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit untuk dijelaskan secara terperinci. Hal ini seringkali didasarkan pada pengalaman pribadi para peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan metode riset yang secara komprehensif menganalisis berbagai aspek individu, kelompok, program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kasus diterapkan untuk menjelaskan proses transisi demokrasi di Tunisia setelah periode Arab Spring.

---

<sup>3</sup> Cresswell J., 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California, Sage Publication, hlm. 7

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Struktur Politik dan Pemerintahan Tunisia

Tunisia, merupakan sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika, menduduki posisi geografis yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan Barat dunia Arab. Nama resmi negara Tunisia adalah *Republic of Tunisia* atau dalam bahasa Arab disebut *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*.<sup>4</sup> Tunisia adalah sebuah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebelumnya, Tunisia merupakan negara monarki. Selama 75 tahun, mulai dari tahun 1881 hingga 1956, Tunisia dijajah oleh Perancis. Pada tanggal 20 Maret 1956 Tunisia merdeka dari Perancis. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden, sementara kabinet yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Sebelum Tunisia menjadi sebuah republik, wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Tunisia menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman pada abad ke-16 setelah penaklukan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian, pada awal abad ke-19, Tunisia mengalami periode semi-otonomi di bawah pemerintahan *Bey* (gubernur) yang diakui oleh Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian, pada tahun 1881, Perancis menjajah Tunisia dan menjadikannya bagian dari Kekolonian Prancis yang disebut "*Protectorate of Tunisia*" (Protectorat Tunisia). Sebagian besar dari periode kolonial Tunisia di bawah kendali Perancis berlangsung hingga tahun 1956 ketika Tunisia meraih kemerdekaan dan menjadi sebuah republik.

Struktur negara dan organisasi kekuasaan politik serta pemerintahan di Tunisia tercermin dengan jelas dalam konstitusi yang pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1959. Selanjutnya, Konstitusi ini, yang terdiri dari 10 bab dan 74 pasal, telah mengalami beberapa amandemen yang semuanya terjadi setelah Buorquiba tidak lagi menjabat sebagai presiden. Amandemen pertama disetujui pada tanggal 12 Juli 1988, dan kemudian diikuti oleh amandemen berturut-turut pada tanggal 29 Juni 1999, 1 Juni 2002, 13 Mei 2003, dan 28 Juli 2008.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Profil Negara Republik Tunisia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia, <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx> diakses pada 24 September 2023 pukul 19.51

<sup>5</sup><http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004842.pdf> diakses pada 24/09/2023 pukul 20:18

Lembaga perwakilan yang disebut *National Parliament (Majlis al-Nuwaab)* bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Institusi ini memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Bahkan dalam situasi di mana tidak ada presiden yang menjabat, ketua parlemen dapat sementara menjadi kepala negara, meskipun masa jabatannya terbatas hanya 45-60 hari. Anggota Parlemen dipilih melalui Pemilihan Umum dan berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Mereka menjabat selama lima tahun sebelum pemilihan umum berikutnya. Anggota parlemen memiliki hak imunitas yang melindungi mereka dari tindakan hukum yang berkaitan dengan pendapat, usulan, atau tindakan mereka di dalam parlemen. Mereka juga tidak dapat dituntut, ditangkap, atau diadili atas tuduhan hukum selama mereka masih menjabat sebagai anggota parlemen.<sup>6</sup>

Kekuasaan eksekutif dikendalikan oleh Presiden, yang bertanggung jawab atas semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan dasar-dasar fundamental pembangunan. Presiden juga memegang peran sebagai kepala negara, terutama dalam fungsi diplomatik dan sebagai komandan tertinggi dalam militer. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, Presiden dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Penunjukan individu untuk posisi-posisi menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Selain itu, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menunjuk pejabat tinggi dalam pemerintahan sipil, seperti gubernur dan walikota, serta dalam lingkup jabatan militer.<sup>7</sup>

Kekuasaan Judikatif di Tunisia dipimpin oleh sebuah lembaga yang mirip dengan Mahkamah Agung, yang disebut *Superior Council of Magistrature* yang diisi oleh hakim-hakim agung. Sistem kehakiman di Tunisia memiliki dua jenis peradilan, yaitu peradilan umum (*Court of Accounts*) dan peradilan administratif (*Administrative Tribunal*), dan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Pengadilan Distrik, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tertinggi (*Cour de Cassation*). Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman ini seharusnya berdiri secara independen. Namun, karena hakim-hakim diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, independensi mereka sangat rentan terhadap "petunjuk" dari pemerintah, terutama dalam kasus-kasus

---

<sup>6</sup> Article 26 & 27 Tunisia Constitution

<sup>7</sup> Article 55 Tunisia Constitution.

politis yang sensitif. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan pada keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh hakim-hakim tersebut dan dapat mengurangi independensi sistem kehakiman secara keseluruhan. Ini adalah masalah yang sering dihadapi dalam sistem peradilan di berbagai negara di mana independensi hakim tidak dijamin sepenuhnya.<sup>8</sup>

### 3.2. Tunisia Masa Habib Bourguiba

Sejak kemerdekaan, pemerintahan Bourguiba di Tunisia memprioritaskan stabilitas negara dengan meningkatkan struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Mereka terus memperbaiki institusi negara sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sering terjadi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, fokus pada memperkuat negara adalah faktor kunci dalam pembangunan. Hal ini sering mengalihkan perhatian publik dari isu-isu seperti proses suksesi, pembatasan kekuasaan, dan masalah-masalah demokrasi lainnya yang bisa menimbulkan ketidakstabilan dan hambatan dalam perkembangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 1974, dalam konstitusi Tunisia, Habib Bourguiba ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan menghindari potensi konflik politik yang bisa muncul akibat pergantian kekuasaan. Namun, dalam jangka panjang, keputusan tersebut juga memicu debat tentang isu-isu demokrasi dan kepemimpinan yang otoriter, yang akhirnya menjadi faktor dalam perubahan politik di Tunisia di kemudian hari.<sup>9</sup>

Krisis ekonomi yang melanda kepemimpinan Bourguiba memunculkan masalah yang serius. Kebijakan yang cenderung sosialis pada tahun 1960-an dan awal 1970-an, termasuk nasionalisasi perusahaan dan pembangunan ekonomi kooperatif, menyebabkan sejumlah negara donor utama yang sebelumnya mendukung pembangunan di Tunisia melakukan boikot besar-besaran. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam neraca ekonomi Tunisia dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Protes-protes masyarakat yang menuntut perubahan dalam kebijakan ekonomi pun

---

<sup>8</sup> US Department of State, "Background Note: Tunisia", released on October 11, 2010, at <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm>

<sup>9</sup> King, Stephen J., *Liberalization Against Democracy: The Local Politics of Economic Reform in Tunisia*, (Indiana: Indiana University Press, 2003) hlm 27-28

mulai berkembang, dan sebagai tanggapannya, Bourguiba, dengan gaya populisnya, mengambil langkah-langkah untuk menghapus sistem ekonomi sosialis. Ia juga memecat menteri perencana pembangunan. Tuntutan awal masyarakat yang berfokus pada isu ekonomi ini kemudian berkontribusi pada munculnya seruan-seruan untuk demokratisasi. Penting untuk dicatat bahwa ketika tuntutan masyarakat bergeser dari isu ekonomi ke isu demokratisasi, ini mencerminkan perubahan dalam dinamika politik Tunisia. Akhirnya, perubahan politik lebih lanjut di Tunisia terjadi dalam bentuk revolusi tahun 2010-2011, yang memicu perubahan besar dalam pemerintahan dan membawa Tunisia ke arah demokratisasi yang lebih besar.<sup>10</sup>

Tekanan yang kuat dari masyarakat membuat pemerintahan Bourguiba merespons dengan tindakan represif. Banyak pemimpin dari kelompok masyarakat yang menjadi kekuatan oposisi ditangkap, dan beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri. Citra Bourguiba yang sebelumnya kharismatik dan populis mulai merosot, berubah menjadi otoriter, sentralistik, dan terlibat dalam praktik korupsi. Meskipun beberapa elemen kekuatan masyarakat diberikan pengakuan formal dengan diizinkan berdirinya dua partai oposisi baru, Bourguiba sebenarnya hanya memeluk sebagian kecil elit rezim yang menjadi minoritas. Sementara itu, serikat pekerja UGTT dan mahasiswa terus ditekan, bahkan kelompok Muslim dilarang secara resmi. Atmosfer politik yang dipenuhi represi ini berlangsung hingga akhirnya Bourguiba digantikan melalui kudeta tanpa darah oleh Ben Ali. Perubahan kepemimpinan ini menempatkan Ben Ali di kursi kepresidenan, mengakhiri era Bourguiba dan membuka babak baru dalam sejarah Tunisia.<sup>11</sup>

### 3.3. Tunisia Masa Zine El Abidine Ben Ali

Pada 7 November 1987, Jenderal Zine El Abidine Ben Ali, yang saat itu adalah tokoh kuat di rezim Bourguiba dan baru saja diangkat sebagai perdana menteri, melakukan kudeta tanpa darah dan mengambil alih jabatan Presiden. Ia berjanji untuk menjalankan agenda demokratisasi dan reformasi ekonomi, dan awalnya, Ben Ali tampak berkomitmen untuk melaksanakan janjinya. Pada tahun 1988,

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> King, Stephen J., *Liberalization Against Democracy: The Local Politics of Economic Reform in Tunisia*, (Indiana: Indiana University Press, 2003) hlm 30



Ben Ali berhasil merangkul pemimpin dari berbagai kelompok sosial untuk menandatangani sebuah kesepakatan atau konsensus nasional. Kesepakatan ini mencakup komitmen untuk mengakhiri sistem partai tunggal, membatasi kekuasaan lembaga negara, dan mencegah monopoli kekuasaan. Kesepakatan ini dianggap sebagai langkah penting dan berpotensi dalam arah demokratisasi. Komunitas internasional pun optimis bahwa Tunisia di bawah kepemimpinan Ben Ali bisa menjadi model bagi upaya serupa di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, dalam praktiknya, banyak yang meragukan keseriusan Ben Ali dalam menerapkan reformasi demokratisasi yang sejati. Meskipun ada beberapa perubahan positif dalam hal kebebasan berbicara dan pers, pemerintahan Ben Ali masih dikenal karena represi terhadap oposisi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Demokratisasi yang dijanjikan oleh Ben Ali tidak sejalan dengan tindakannya, dan Tunisia masih mengalami otoritarianisme yang signifikan selama pemerintahannya.

Tunisia di bawah pemerintahan Ben Ali menggelar lima pemilu, yaitu pada tahun 1989, 1994, 1999, 2004, dan 2009. Dalam semua pemilu tersebut, Ben Ali selalu keluar sebagai pemenang dan memegang kursi presiden Tunisia dari partai RCD (*Constitutional Democratic Rally*). Pada pemilu tahun 1989, sistem pemilu masih mengikuti model yang diterapkan pada masa pemerintahan Bourguiba. Namun, Ben Ali mulai memperkenalkan konsep pluralisme politik dengan mengizinkan beberapa partai politik baru untuk berpartisipasi dalam Dewan Perwakilan (parlemen) pada tahun 1993. Meskipun ada peningkatan dalam pluralisme politik dan sejumlah partai politik baru diizinkan untuk beroperasi, dominasi partai RCD dijamin dalam pemilu-pemilu tersebut.<sup>12</sup>

Sementara pemilu secara formal diadakan, lingkungan politik dan pemilu di Tunisia pada masa pemerintahan Ben Ali sering kali diwarnai oleh tuduhan pelanggaran pemilihan, praktik otoriter, dan pembatasan terhadap oposisi politik. Hasil pemilu yang selalu menguntungkan Ben Ali dan partainya menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemilu-pemilu tersebut mewakili kehendak sebenarnya dari masyarakat Tunisia. Akhirnya, ketidakpuasan politik dan sosial terhadap rezim Ben Ali memuncak dalam Revolusi Tunisia

---

<sup>12</sup> Tunisia Parliamentary Chamber: Majlis Al-Nawab election held in 1994, [http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321\\_94.htm](http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2321_94.htm) diakses pada 26/09/2023 pukul 10.09

pada tahun 2010-2011, yang mengakibatkan penggulingan Ben Ali dan perubahan besar dalam politik Tunisia.

Sistem demokrasi multi-partai yang diperkenalkan oleh Ben Ali tampaknya mengarah ke jenis rezim otoriter yang lebih tersembunyi, yang disebut sebagai "*Consensual Authoritarianism*." Dalam rezim baru ini, ada pengakuan terhadap keberadaan oposisi dan mereka diberikan kesempatan untuk menyajikan pandangan alternatif, tetapi upaya keras dilakukan untuk mencegah pengaruh yang dapat mengganggu peran dominan partai penguasa. Dalam banyak pidato publiknya, Presiden selalu menekankan pentingnya melaksanakan sistem multi-partai di bawah pengawasan negara dan menciptakan iklim masyarakat sipil yang tidak mengganggu kesepakatan persatuan nasional. Ini berarti bahwa Presiden dan penasihatnya yang tergabung dalam partai penguasa tetap memiliki hak untuk menentukan bentuk dan konsep "konsensus nasional" dan tetap menjadi pengaruh utama dalam merumuskan kebijakan negara.<sup>13</sup>

Dalam rezim seperti ini, meskipun ada tampilan pluralisme politik, kekuasaan sebenarnya masih sangat terpusat dan otoriter. Pengawasan negara atas partai-partai oposisi dan masyarakat sipil dapat meredam potensi ancaman terhadap pemerintah, sementara partai penguasa tetap mengendalikan mayoritas aspek penting dalam pemerintahan. Dengan demikian, bentuk otoritarianisme yang lebih halus seperti ini dapat mempertahankan kontrol yang kuat sambil menjaga tampilan demokrasi.

Di samping tantangan politiknya, pemerintahan Ben Ali juga menghadapi sejumlah masalah ekonomi. Tunisia menghadapi beberapa masalah ekonomi, termasuk tingginya nilai impor, walaupun negara ini juga aktif dalam ekspor, tingkat inflasi yang mencapai 3% per tahun, dan masalah utang luar negeri. Tunisia sering kali mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi penduduknya<sup>14</sup>.

Pengangguran menjadi isu utama yang belum terselesaikan di Tunisia, dan masalah ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Tingkat

---

<sup>13</sup> King, Stephen J., *Liberalization Against Democracy: The Local Politics of Economic Reform in Tunisia*, (Indiana: Indiana University Press, 2003) hlm 31

<sup>14</sup> Dwi Wahyu Anggorowati, 2014, Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali di Tunisia tahun 2011, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/22749/1/SKRIPSI.pdf>. diakses pada 26/29/2023 pukul 10:31 hlm.. 56-58

pengangguran juga bervariasi di berbagai wilayah negara ini, tetapi wilayah barat laut dan barat daya Tunisia memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, namun hingga saat ini belum memberikan hasil yang signifikan.

Selama periode tahun 2001-2009, rata-rata 73.300 lapangan pekerjaan baru diciptakan setiap tahun untuk mencapai total 659.700 lapangan pekerjaan yang diperlukan. Jumlah pekerjaan yang dibuka tersebut mampu menyerap 89,3% dari permintaan lapangan pekerjaan tambahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penciptaan lapangan pekerjaan ini lebih cenderung mengakomodasi lulusan sekolah menengah daripada individu yang memiliki pendidikan tinggi. Ini mencerminkan salah satu kelemahan pokok dalam pasar tenaga kerja Tunisia, yaitu ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan tingkat pengangguran yang ada, bahkan meningkatnya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja.

Selama periode 2001-2007, lapangan pekerjaan yang dibuka bagi lulusan sekolah menengah mencakup 71,7% dari total lapangan pekerjaan yang tersedia. Sementara pada periode yang sama, permintaan lapangan pekerjaan untuk lulusan universitas mencakup rata-rata 41% dari permintaan keseluruhan, tetapi pekerjaan yang diciptakan hanya menyumbang rata-rata 34,2% dari total lapangan pekerjaan.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan di bawah pemerintahan Ben Ali mengikuti standar Eropa, termasuk penetapan Upah Minimum Regional. Namun, perkembangan sektor teknologi tinggi dibatasi oleh pemerintah, yang berdampak pada ketersediaan pekerjaan yang sesuai bagi lulusan universitas yang menjadi semakin langka.<sup>15</sup>

Salah satu isu sosial yang menjadi sorotan adalah perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan pers, di bawah pemerintahan Ben Ali. Secara hukum, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Ben Ali. Selama masa kepresidenannya, kebebasan pers dibatasi secara signifikan. Para jurnalis diberlakukan dengan aturan yang melarang mereka untuk mengeluarkan berita yang dapat merusak

---

<sup>15</sup> Maher Gassab & Hanene B.O Jamaussi, 2014, *Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia*, Almauera, Italia hlm. 3-6

nama baik pemerintah atau membuat fitnah terhadapnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah perlakuan terhadap wartawan Taufik Ben Brik, yang menghadapi pelecehan dan penjara karena kritiknya terhadap pemerintahan Ben Ali. Ben Ali berusaha untuk menutup-nutupi kelemahan pemerintahannya dengan menekan kebebasan pers. Para jurnalis yang melanggar peraturan tersebut diancam dengan sanksi penjara hingga lima tahun. Selama masa pemerintahannya, sekitar 100 jurnalis Tunisia telah dipenjarakan sebagai akibat dari tindakan mereka.

Masalah yang dihadapi oleh para jurnalis selama bertahun-tahun ini akhirnya menjadi sebuah bumerang bagi pemerintahan Ben Ali, karena para jurnalis akhirnya bersatu dan melakukan serangan balik terhadap pemerintah dengan bergabung dalam upaya melawan pemerintahan yang otoriter ini.<sup>16</sup>

#### **4. Krisis Politik di Tunisia**

##### **4.1. Kronologi Pembakaran Diri Mohammad Bouazizi**

Revolusi melati berawal dari sebuah aksi pembakaran diri Mohammad Bouazizi<sup>17</sup>, Mohammad Bouazizi adalah seorang pemuda berusia 26 tahun yang lahir di Sidi Bouzid, sebuah daerah terpencil di Tunisia. Bouazizi merupakan tulang punggung keluarganya, dan sejak usia 10 tahun, ia sudah menjual produk-produk pertanian di pasar lokal untuk membantu keluarganya. Ia menyadari betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh keluarganya. Meskipun ibunya telah menikah lagi, suami Menobia Bouazizi sering kali sakit dan tidak dapat bekerja. Oleh karena itu, Mohammad Bouazizi merasa bahwa ia harus fokus bekerja daripada mengejar pendidikan.

Setelah ditolak bergabung dalam angkatan bersenjata, Bouazizi tidak memiliki banyak opsi selain untuk melanjutkan usahanya di pasar. Bouazizi digambarkan sebagai individu yang jujur dan pekerja keras. Setiap harinya, ia dengan tekun mendorong gerobak kayunya menuju toko swalayan, lalu mengisi gerobak tersebut dengan buah dan sayuran. Kemudian, dengan gigih ia membawanya sejauh dua kilometer ke pasar lokal<sup>18</sup>. Meskipun hampir setiap hari ia

---

<sup>16</sup> Maher Gassab & Hanene B.O Jamaussi, *Determinants of Graduate Unemployment in Tunisia*, Almauera, Italia, 2014 hlm. 58-59

<sup>17</sup> Isawati. *Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia Barat)* Jilid 2. Yogyakarta: Ombak 2013 .hlm 10

<sup>18</sup> Ibid

menghadapi tekanan dari pihak berwenang. Bouazizi terus melanjutkan usahanya dalam berdagang.

Bouazizi sebenarnya merupakan seorang lulusan universitas yang terpaksa menjalani kehidupan dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima atau PKL. Ibunya, Mohammed Bouazizi, menyatakan bahwa tindakan membakar diri tersebut tidak dilakukan karena alasan ideologi atau politik. Tindakan itu semata-mata dipicu oleh keinginan untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya sebagai manusia. Menurut ibunya, sangat memalukan bagi anaknya harus menderita, dilecehkan, dan disiksa oleh aparat, hal yang tidak dapat lagi ditoleransi oleh Bouazizi. Aksi membakar diri yang dia pilih merupakan langkah terbaik yang bisa diambilnya ketika dia merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup dan tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan sewenang-wenang serta penghinaan yang hampir setiap hari diterimanya dari aparat.

Bouazizi seringkali menjadi target otoritas berwenang di kota kecil Sidi Bouzid. Penyitaan yang dilakukan oleh polisi tampaknya telah menjadi kejadian yang sering dialami oleh Bouazizi dan warga lain di Sidi Bouzid. Bahkan sekitar enam bulan sebelum Bouazizi mengambil langkah tragis dengan melakukan tindakan bunuh diri, pihak berwenang telah meminta denda sebesar 400 dinar kepada Bouazizi, yang setara dengan dua bulan pendapatannya. Namun, semua kekesalan ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Desember 2010.

Penghinaan dan tekanan yang ia terima tampaknya mencapai tingkat serangan fisik. Seorang petugas polisi wanita bernama Fedya Hamdi menghadangnya saat Bouazizi dalam perjalanan menuju pasar. Dia meminta Bouazizi untuk menyerahkan timbangan yang dimilikinya, namun Bouazizi menolak untuk melakukannya. Setelah saling berbicara dengan nada yang meninggi, oknum polisi wanita tersebut menamparnya, dan dengan bantuan rekan-rekannya, mereka menangkap Bouazizi di jalan. Petugas polisi tersebut mengambil semua barang dagangan Bouazizi beserta timbangan miliknya.<sup>19</sup>

Setelah insiden itu, Bouazizi tampaknya tetap berusaha untuk melakukan protes. Ia mengunjungi kantor pemerintah untuk mencari pertemuan dengan salah satu pejabat dan berbicara tentang tindakan polisi yang merampas barang-barangnya. Laporan pengaduan Bouazizi ini tidak mendapatkan respon yang serius dari pejabat

---

<sup>19</sup> Ibid

pemerintahan, bahkan pejabat tersebut menolak untuk melihat dan mendengarkan pengaduan nasibnya. Buoazizi kemudian mengancam membakar dirinya setelah pejabat pemerintahan mengabaikan kekuhannya. Ia pergi dan kembali lagi dengan membawa dua botol berisi bensin kemudian membakar dirinya di depan kantor Gubernur pemerintah daerah, Sidi Bouzid. Buoazizi sempat bawa ke rumah sakit dan bahkan Presiden Ben Ali sempat juga menjenguknya. Namun, Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011. Aksi bakar diri (*self-immolation*) yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas, melalui pemberitaan media-media nasional dan internasional, diikuti oleh demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter di negara-negara Arab, bukan hanya di Tunisia.<sup>20</sup>

Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, gerakan protes telah merambat ke seluruh Tunisia. Banyak faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa massa tersebut terus berlangsung di seluruh negeri, termasuk peran media sosial yang sangat masif dalam menyebarkan berita tersebut. Disamping itu faktor yang mendorongnya berkembang pesat adalah tindakan represif yang diambil oleh aparat pemerintah Tunisia terhadap para demonstran. Awalnya, gerakan ini hanya merupakan bentuk solidaritas terhadap Bouazizi, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan sosial yang menyoroti permasalahan pengangguran, kekerasan, dan korupsi. Pada minggu pertama protes, pergerakan ini telah menyebar dari Sidi Bouzid hingga Menzel Bouzaine. Di wilayah pinggiran yang miskin tersebut, protes memicu konflik dengan aparat keamanan yang bahkan berujung pada korban jiwa.<sup>21</sup>

Gerakan *people power* yang terjadi dalam melawan kendali negara tidak pernah terjadi sebelumnya semenjak kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956. Menanggapi gerakan sipil tersebut presiden Tunisia Ben Ali menyatakan bahwa negaranya dalam keadaan darurat dan dia juga bernjanji untuk mengadakan pemilihan legislatif baru dalam waktu enam bulan.<sup>22</sup> Dalam kesempatan itu juga Ben Ali

---

<sup>20</sup> Sidik Jatmika, *The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, *Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. 2013.hlm. 159

<sup>21</sup> Jon Jensen, "The Making of a Martyr: Truth or Legend?," *Public Radio International*, diakses 14 Desember, 2018, <https://www.pri.org/stories/2011-05-16/making-martyr-truth-or-legend>.

<sup>22</sup> Apriadi Tamburaka, 2011, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di*

mengatakanakan akan menurunkan harga makanan pokok, menjamin kebebasan politik, media massa, serta berjanji akan mundur dari presiden pada tahun 2014.

Janji Ben Ali tersebut merupakan bagian dari upayanya untuk meredam kemarahan rakyat Tunisia terhadap rezim otoritarian yang dia bangun sejak menggulingkan Habib Bourguiba pada tanggal 7 November 1987. Namun upaya politik yang dilakukan oleh Ben Ali, termasuk dengan mengunjungi Bouazizi di rumah sakit sebelum meninggal, tidak membuahkan hasil. Demonstrasi terus berlanjut di seluruh negeri, bahkan tokoh tokoh yang selama ini menjadi bagian dari rezim membelot tidak mematuhi perintah Ben Ali.

Kekuasaan Ben Ali di Tunisia berakhir setelah pernyataannya untuk mengundurkan diri dari kekuasaannya sebagai preseden pada tanggal 14 Januari 2011, peristiwa ini merupakan fase puncak dari fase pergerakan revolusi jasmine di Tunisia. Pernyataan Ben Ali untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Tunisia diumumkan dalam televisi nasional pada tanggal 13 Januari 2011 bahwa ia tidak akan mencalonkan kembali sebagai presiden Tunisia pada pemilu periode berikutnya tahun 2014.<sup>23</sup> Selain pernyataannya untuk mundur dari jabatan presiden ia juga menyatakan menjamin kebebasan berpendapat masyarakat Tunisia, menginvestigasi tewasnya pengunjuk rasa selama berlangsungnya demonstrasi di Tunisia, disamping itu pada hari yang sama beberapa situs jejaring sosial seperti facebook, Twitter dll yang sebelumnya diblokir dapat diakses kembali.<sup>24</sup>

Tanggal 14 Januari 2014, Ben Ali menyatakan keadaan darurat nasional dan sebagai upaya terakhir yang dilakukan dalam meredam amarah pengunjuk rasa yaitu dengan mengumumkan pemecatan terhadap beberapa menteri dan melakukan pemilu legislatif dalam waktu enam bulan. Masih pada hari yang sama setelah Ben Ali menyatakan keadaan darurat nasional, ia memutuskan untuk pergi melarikan diri meninggalkan Tunisia.<sup>25</sup>

Salah satu aspek menarik dari Revolusi Jasmin di Tunisia adalah kehadiran generasi muda sebagai motor penggeraknya.

---

Negara-Negara Timur Tengah, Penerbit Narasi, Yogyakarta, hlm 25-31

<sup>23</sup> Zine al-Abidine Ben Ali forced to flee Tunisia as protesters claim victory | Zine al-Abidine Ben Ali | The Guardian. Diakses pada tanggal 19/09/2023 pukul 20.30

<sup>24</sup><http://english.aljazeera.net/indepth/spotlight/tunisia/2011/01/201114142223827361.html>  
. Diakses pada tanggal 19/09/2023 pukul 20:42

<sup>25</sup> Ibid

Kelompok pertama yang terlibat dalam revolusi adalah para pemuda yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, merasa berhubungan dengan nasib tragis Mohamed Bouazizi. Peran usia muda dalam memimpin protes membentuk karakter gerakan sosial di Tunisia. Penggunaan media sosial untuk menyuarakan protes dan memperkuat solidaritas menjadi ciri khas gerakan sosial di Tunisia dan wilayah Timur Tengah. Para blogger memegang peran penting dalam hal ini, selain menyebarkan informasi tentang protes, mereka juga aktif dalam mengorganisir masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlawanan. Peran para blogger menjadi sentral karena rezim Ben Ali menerapkan sensor terhadap media dalam negeri dan melarang media internasional untuk meliput protes di Tunisia<sup>26</sup>.

#### 4.2. Demokrasi Tunisia setelah Revolusi Jasmin

Setelah jatuhnya rezim Ben Ali, Tunisia mengalami berbagai dinamika politik yang signifikan. Menurut laporan *The Guardian*, setidaknya terdapat tiga kali perubahan kabinet yang terjadi setelah Revolusi Melati, dan juga dua pergantian Perdana Menteri<sup>27</sup>. Masyarakat Tunisia menuntut pembentukan pemerintahan sementara. Presiden sementara, Foued Mebazaa, meminta kepada Perdana Menteri Mohammed Ghannoushi untuk membentuk pemerintah koalisi. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkan pemerintah dari ambang kehancuran, dengan mengutamakan kepentingan nasional dan membentuk pemerintah persatuan nasional. Tindakan tersebut mendapat dukungan dari pemimpin oposisi di Tunisia. Pemerintah persatuan darurat akan segera dibentuk dengan tujuan mengakhiri kerusuhan yang mengancam negara tersebut.

Pada 23 Oktober 2011 Tunisia melaksanakan pemilihan umum untuk *National Constituent Assembly*. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh partai *Ennahda* dengan perolehan suara sebanyak 37% dari jumlah pemilih. *National Constituent Assembly* ini bertugas untuk mengadakan pembaharuan konstitusi negara. Semenjak tahun 1959 konstitusi Tunisia belum pernah diperbaharui.

---

<sup>26</sup> Culberston, Shelly. *The Fire of The Springs*. New York: St. Martin's Press, 2016. Hlm. 18

<sup>27</sup> <http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/25/tunisian-dissident-blogger-minister-quits>. Diakses pada 21/09/2023 pukul 10:33



Tunisia terus berupaya dalam memperbaiki diri, hingga pada Januari 2014 Majelis Nasional Tunisia menyetujui konstitusi baru negara. Pengesahan konstitusi ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam membangun demokrasi di Tunisia setelah tiga tahun jatuhnya rezim Ben Ali. Konstitusi baru ini dianggap sebagai pengejawantahan impian rakyat Tunisia, sebuah bukti kebangkitan dari revolusi mereka, dan akan membentuk negara sipil yang demokratis. Persetujuan konstitusi ini, serta kemajuan yang dicapai, membuat Tunisia berbeda dengan negara-negara lain di kawasan yang mengalami transisi pasca-Arab Spring. Sebagai perbandingan, Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman masih terus berjuang dengan konflik internal mereka masing-masing setelah revolusi tahun 2011<sup>28</sup>.

Pengesahan konstitusi baru ini menjadikan Tunisia sebagai negara yang paling progresif di kawasan tersebut. Konstitusi ini mencakup jaminan kesetaraan hak antara pria dan wanita serta menuntut pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi. Selain itu, konstitusi ini juga mengatur pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden, menggarisbawahi upaya Tunisia untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Sebelum Arab Spring, Tunisia mengadopsi sistem demokrasi pemilihan umum di mana presiden dipilih melalui proses pemilu dengan masa jabatan lima tahun. Namun, dalam setiap pemilu, Ben Ali sering kali terpilih sebagai presiden, terutama karena mendapatkan dukungan kuat dari Partai Konstitusi Demokratis yang menguasai lebih dari 80% kursi di parlemen. Aktivis dan kelompok oposisi selalu diawasi secara ketat oleh rezim, sehingga sulit untuk berkembang, dan hal ini juga mengakibatkan partisipasi publik yang rendah dalam dinamika sosial dan politik di Tunisia. Setelah terjadinya Arab Spring dan jatuhnya rezim bin Ali, berbagai partai politik mulai bermunculan di Tunisia. Setidaknya ada empat partai yang mendominasi lanskap politik di negara tersebut, yaitu *An-Nahdhah*, *The Congress For the Republic*, *Ettakatol*, dan *Modernist Democratic Pole and Democratic Progress Party*. Saat ini, *An-Nahdhah*

---

<sup>28</sup><https://www.republika.co.id/berita/koran/newsupdate/%2014/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-barutunisia>, diakses pada 21/09/2023 pukul 12:06

menjadi partai Islam yang populer dan mendominasi mayoritas suara, diikuti oleh partai-partai lainnya.<sup>29</sup>

Tunisia memang menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi negara-negara di Timur Tengah, khususnya negara-negara Muslim, untuk mengatasi keterpurukan, konflik sektarian yang berkepanjangan, dan perang saudara. Perjalanan menuju demokrasi memang memerlukan waktu yang cukup lama di wilayah ini. Model demokrasi Barat, yang mencakup pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, keadilan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan toleransi agama, merupakan nilai-nilai yang benar-benar baru bagi banyak negara di Timur Tengah. Menerapkan demokrasi secara menyeluruh adalah proses yang kompleks, terutama karena konsep demokrasi masih terasa abstrak di wilayah ini.<sup>30</sup>

Kesuksesan penerapan demokrasi di Tunisia adalah angin segar bagi Timur Tengah. Menurut Samuel Huntington, ada tiga hal yang menghambat kemajuan demokrasi, yaitu faktor politik, ekonomi, dan budaya<sup>31</sup>. Huntington berpendapat bahwa budaya dapat menjadi penghalang bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah, terutama karena dominasi Islam di wilayah tersebut. Namun, Tunisia menjadi pengecualian dari pandangan ini, seperti yang terlihat dari pemilihan partai *Ennahda* yang berhaluan Islamis.

Tunisia telah menunjukkan bahwa perubahan menuju demokrasi bisa terjadi meskipun kompleks, dan bahwa nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan secara berhasil dalam konteks Timur Tengah. Meskipun tantangan masih ada, Tunisia memberikan contoh bahwa dengan kesabaran, komitmen, dan kerja keras, demokrasi dapat menjadi bagian integral dari perjalanan politik di wilayah ini. Harapannya adalah bahwa negara-negara lain di Timur Tengah akan menemukan inspirasi dan dukungan untuk mengikuti jejak Tunisia dalam upaya memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi.

## 5. Melati sebagai simbol Revolusi Tunisia

---

<sup>29</sup> Muhammad Fakhry Ghafur, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*, 11.2 (2016), 16 (p. 89).

<sup>30</sup> Shafira Elnanda Yasmine, 'Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016), 106-13 (pp. 110-11)

<sup>31</sup> Samuel P. Huntington, 1991, *Democracy's Third Wave*, *Journal of Democracy* Vol. 2 No. 2 *Spring* 1991 hlm. 20-22

Nama "*Jasmin Revolution*" (Revolusi Melati) sendiri mengacu pada bunga melati dan mencerminkan semangat damai yang diusung oleh gerakan ini. Melati dipilih sebagai simbol karena keharumannya dan harum wangi yang memperkuat pesan perdamaian, keadilan, dan harapan bagi perubahan positif.

Penyematan istilah "Revolusi Melati" pada peristiwa yang terjadi di Tunisia mencerminkan semangat nasionalisme yang dianut oleh masyarakat Tunisia. Bunga Melati dianggap sebagai simbol nasional negara tersebut, dan sejarah kedatangannya ke Tunisia dapat ditelusuri sejak abad ke-18, ketika spesies bunga Melati pertama kali dibawa dari Andalusia (Spanyol) ke Tunisia dan kemudian berkembang di sana. Melati menjadi lambang revolusi di Tunisia, bahkan pergantian presiden secara damai pada tahun 1987 juga dikenal sebagai "Revolusi Melati"<sup>32</sup>. Secara simbolik, pemasangan melati pada telinga dapat mencerminkan status pernikahan seseorang. Jika melati ditempatkan di telinga sebelah kanan, hal itu dapat diartikan bahwa seseorang masih berstatus lajang. Sebaliknya, jika melati ditempatkan di telinga sebelah kiri, hal tersebut dapat diartikan sebagai tanda bahwa seseorang telah menikah<sup>33</sup>.

Bunga melati di Tunisia memiliki makna yang sangat mendalam dan simbolis, terutama selama Revolusi Tunisia pada tahun 2010-2011 yang mengakibatkan jatuhnya rezim Zine El Abidine Ben Ali. Bunga melati menjadi simbol penting dalam revolusi ini setelah aksi dramatis yang dilakukan oleh Mohamed Bouazizi pada Desember 2010. Bouazizi, seorang pedagang buah-buahan yang putus asa akibat perlakuan tidak adil dan korupsi, membakar dirinya sebagai bentuk protes, memicu gelombang demonstrasi dan protes di seluruh Tunisia. Selama perlawanan tersebut, bunga melati menjadi simbol damai dan perlawanan terhadap ketidakadilan, seringkali digunakan oleh para demonstran sebagai representasi keinginan akan kebebasan dan keadilan. "Revolusi Melati," sebuah istilah yang merujuk pada gerakan ini, mencerminkan semangat perdamaian yang diusung oleh para aktivis, dengan bunga melati putih dianggap sebagai simbol ketulusan dan harapan akan perubahan positif.

Melalui penggunaan simbol-simbol seperti bunga melati, gerakan rakyat Tunisia berhasil menyatukan orang-orang dari

---

<sup>32</sup> Cruz, Georgina. Dalam artikel 'Only A Day in Tunisia', *Cruise Travel Magazine* (USA), Oktober 2007. hlm 32.

<sup>33</sup> Ibid

berbagai lapisan masyarakat dalam tuntutan bersama untuk kebebasan, demokrasi, dan peningkatan kondisi sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, Revolusi Melati membawa perubahan politik di Tunisia dengan penggulingan rezim otoriter dan penciptaan jalan menuju demokrasi yang lebih inklusif.

## 6. Kesimpulan

Revolusi Tunisia, yang dimulai pada Desember 2010 dan mencapai puncaknya dengan penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada Januari 2011, menandakan keinginan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Peristiwa ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap rezim otoriter, korupsi, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain menjadi pemicu Arab Spring di seluruh dunia Arab, Tunisia adalah satu-satunya negara yang mengalami transisi politik yang relatif sukses.

Setelah melewati Revolusi Melati, Tunisia mengalami perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, terjadi pergeseran menuju sistem yang lebih demokratis, dengan pembentukan konstitusi baru pada tahun 2014 dan pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan inklusif. Meskipun demikian, tantangan ekonomi seperti tingginya tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi isu krusial yang perlu diatasi. Tunisia juga dihadapkan pada tantangan keamanan dari kelompok ekstremis, sementara tuntutan masyarakat terus berkaitan dengan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi. Meski begitu, Tunisia tetap menjadi model inspiratif dalam proses transisi demokratis di kawasan tersebut.

## Daftar Pustaka

Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2011

Abouzeid, Rania, "Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire", *TIME*, Jan. 21, 2011

Alexander, Chris, "State, Labor, and the New Global Economy in Tunisia." In Dirk J. Vandewalle (ed.), *North Africa: Development and Reform in a Changing Global Economy*, (New York: St. Martin's Press, 1996)

Hasbiyallah

Bayat, A. *The Arab Spring and its Surprises. Development and Change*. 2013

BBC, "Habib Bourguiba: Father of Tunisia", *BBC News*, 6 April 2000 at <http://news.bbc.co.uk/2/hi/obituaries/703907.stm>

Cruz, Georgina. 'Only A Day in Tunisia', *Cruise Travel Magazine* (USA), Oktober 2007

Editors, "Tunisia: Bourguiba and After", in P.J Bearman (et.al), (eds.), *The Encyclopaedia of islam New Edition, volume X*, (Leiden: E.J. Brill, 2000)

Entelis, John P., "Political Islam in The Maghreb: Non-Violent Dimension", dalam John P. Entelis, (ed.), *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, (Indiana: Indiana University Press, 1997)

Era Muslim, "Kebangkitan Gerakan Islam di Tunisia Pasca Ben Ali", 26 Januari 2011 at <http://www.eramuslim.com/berita/gerakan-dakwah/kebangkitan-islam-di-tunisia-pasca-ben-ali.htm>

Hamdi, Mohamed Elhachmi, *The Politicisation of Islam: A Case Study of Tunisia*. (Boulder, Colo.: Westview, 1998)

Hole, Abigail, (et.al), *Tunisia: Country Guide*, ( New York: Lonely Planet Publication, 2008)

Hopkins, Nicholas S., "Tunisia", in Melvin Ember and Carol R. Ember, *Countries and Their Cultures Volume 4*, (New York: Macmillan Reference USA, 2001)

Isawati, *Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia Barat) Jilid 2*. Yogyakarta: Ombak 2013

King, Stephen J., *Liberalization Against Democracy: The Local Politics of Economic Reform in Tunisia*, (Indiana: Indiana University Press, 2003)

Muhammad Fakhry Ghafur, 'Agama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya', *Jurnal Penelitian Politik*. 2016

Profil Negara Republik Tunisia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia, <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia>

Hasbiyallah

Sahide, A. *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*. 2019. Jakarta: Kompas

Sidik Jatmika, 2013, *The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*, *Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Shafira Elnanda Yasmine, 'Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2016)

Samuel P. Huntington , 1991, *Democracy's Third Wave*, *Journal of Democracy* Vol. 2 No. 2 *Spring* 1991 hlm. 20-22

*Tunisia Constitution* at <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafraad/unpan004842.pdf>

Tunisia Parliamentary Chamber: *Majlis Al-Nawab* election held in 1994, [http://archive.ipu.org/parlinee/reports/arc/2321\\_94.htm](http://archive.ipu.org/parlinee/reports/arc/2321_94.htm)

US Department of State, "*2010 Human Rights Report: Tunisia*", April 8, 2011, at <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154474.htm>

US Department of State, "*Background Note: Tunisia*", released on October 11, 2010, at <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm>